

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin

Oleh :

Devi Fitria Permata Sari
192020100024

Dosen Pembimbing :
Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Agustus, 2023

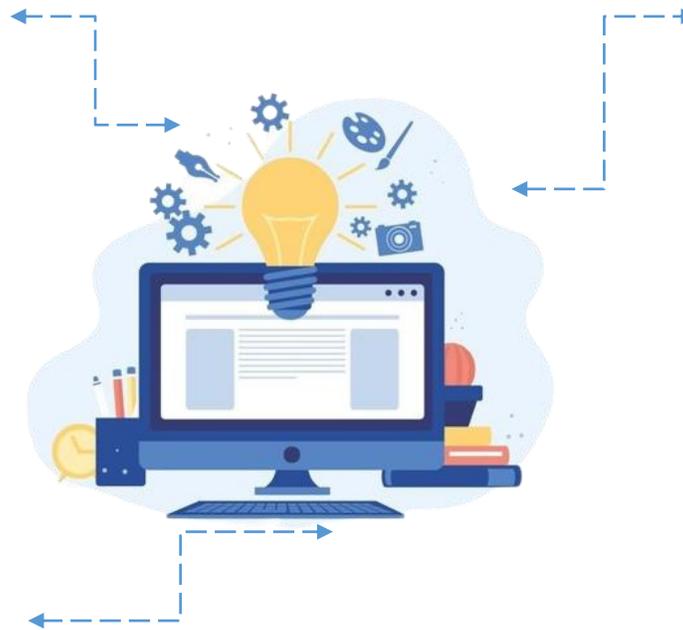
Pendahuluan

Permasalahan Sampah

Permasalahan sampah masih menjadi sorotan dan hampir semua kota di Indonesia menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Khususnya di daerah perkotaan, dapat dikatakan bahwa mengelola sampah di perkotaan sangat sulit dan memiliki banyak tantangan dalam pengelolaannya, belum lagi di perkotaan banyak sekali terdapat pabrik dan perusahaan besar yang menghasilkan sampah jauh lebih banyak.

Sampah

sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai, seperti sisa makanan dll, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pembusukan seperti plastik dll. Sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sangat banyak jumlahnya dan seringkali hanya dibakar sehingga menghasilkan polusi bagi lingkungan sekitar.

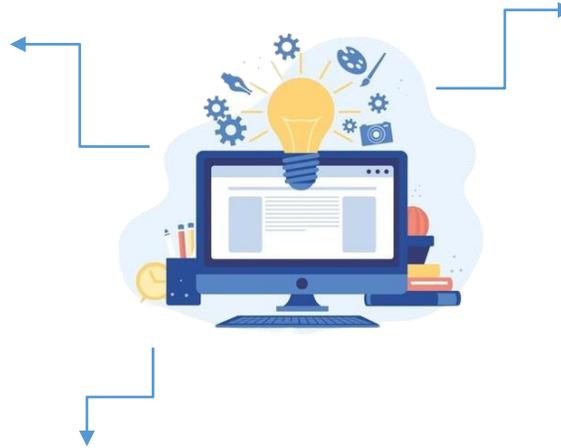


Kebijakan Pemerintah

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendahuluan

Menurut Kuncoro Sejati (2009 : 24), pengelolaan sampah merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah mulai dari ditimbulkannya sampah hingga pembuangan akhir. Sampah harus dikelola dengan sebaik mungkin, jika sampah tidak dibuang dan dikelola dengan baik maka akan berdampak pada pencemaran terhadap lingkungan manusia.



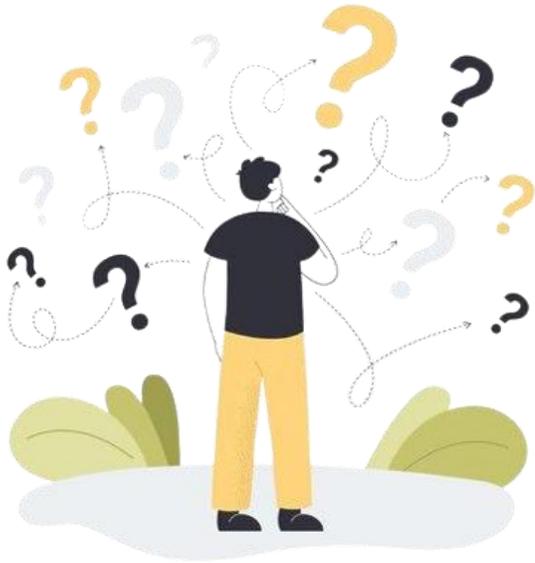
Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas di setiap daerah maka akan semakin meningkat juga jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah akan berdampak pada lingkungan sekitar, akan terjadi pencemaran pada lingkungan terutama di kota-kota besar yang memiliki banyak kawasan industri. Saat ini semakin banyak dibangun gedung seperti kawasan industri juga tempat makan, mengakibatkan meningkatnya volume sampah.

Tabel 1. Data Sampah Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah Timbulan Sampah Harian	Timbulan Sampah Tahunan
1	Tahun 2019	1.223,93 ton	446.733,65 ton
2	Tahun 2020	1.086,24 ton	396.476,90 ton
3	Tahun 2021	1.114,65 ton	406.6847,51 ton

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

Permasalahan Dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Di Desa Boro



1

Belum tersedianya tempat pembuangan khusus untuk sampah di Desa Boro

2

Para warga membuang sampah di kawasan parit dan sungai mengakibatkan pencemaran pada lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan.

3

Juga minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir.

PENELITIAN TERDAHULU

Muhammad Ibrahim
Sahupala, 2020

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan dengan baik di Dinas Lingkungan Hidup. Namun masih kurang optimalnya Pemerintah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, akibat terbatasnya anggaran dari APBD, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

Ida Probosari, 2020

“Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam proses penanganan sampah rumah tangga dengan melalui program Bank Sampah Resik Becik yang ada di Kelurahan Krobokan Kota Semarang.

M. Farhan Surya Novaldi
dkk , 2022

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang”.

Hasil penelitian yang di dapat dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Margagiri sudah berusaha mengatasi masalah sampah dengan cara sampah diangkut oleh petugas dari rumah warga kemudian diolah di TPS dan sebagian di buang di TPS Cilowong. Namun pada saat membuat keputusan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal.

METODE PENELITIAN



Jenis Penelitian

Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.



Lokasi Penelitian

Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.



Teknik Penentuan Informan

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi.



Teknik Penganalisisan Data

Menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan teori dari Edward III. yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.



Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik *purposive sampling*

Hasil Dan Pembahasan

Komunikasi

Implementasi dapat dikatakan efektif jika pembuat keputusan kebijakan telah mengerti apa yang harus dilakukan. Tujuan dari komunikasi adalah adanya konsistensi dari para pelaksana kebijakan yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila penyaluran komunikasi dilakukan dengan baik maka implementasi juga dapat berjalan baik. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Boro, Pemerintah Desa Boro melakukan komunikasi melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan komunikasi antara Perangkat Desa Boro dan Petugas pengurus sampah serta masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Gambar 2



Sumber : Diolah dari Perintah Desa Boro, 2023

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa perangkat Desa Boro telah melakukan sosialisasi yang melibatkan pengurus sampah dan masyarakat. Sosialisasi untuk memberitahukan kepada warga terkait dengan kegiatan pengangkutan sampah dan menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Komunikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa beserta jajarannya melalui sosialisasi telah berjalan dengan lancar. Akan tetapi, sosialisasi masih kurang maksimal karena tidak konsisten dalam pelaksanaannya, sebab sosialisasi dilaksanakan hanya satu kali dan tidak dilaksanakan secara rutin. Selain itu, yang mengikuti sosialisasi hanya sebagian warga saja, yang dapat menimbulkan miskomunikasi dari setiap masyarakat sehingga ada yang setuju dan ada yang kurang setuju dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan cara pengangkutan sampah karena adanya penarikan iuran sebagian warga tidak mau jika harus membayar.

Hasil Dan Pembahasan

Sumber Daya

Goerge C Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Di dalam implementasi, sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas fisik. Jika sumber daya implementor sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut kurang maka implementasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Hasil Dan Pembahasan

Gambar 3



Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Dari gambar 3 menunjukkan bahwa Sumber daya fasilitas masih kurang memadai karena hanya ada 1 motor sampah 3 roda untuk mengangkut sampah sedangkan sampah dari rumah warga jika dihitung setiap harinya mencapai 1 ton sehingga jika sampah tidak mencukupi untuk di bawa ke motor maka petugas sampah harus bekerja dua kali untuk mengambil sampah dari rumah warga yang lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Desa Boro masih belum optimal. Hal itu salah satunya disebabkan karena faktor adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. mulai dari jumlah pegawai pengurus sampah yang terbatas, anggaran dana yang juga masih kurang, dan fasilitas yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana terkait tempat pembuangan sampah belum memadai dan dinilai masih kurang. Akibatnya para warga membuang sampah di sungai dan membakarnya di halaman rumah. Implementasi kebijakan membutuhkan fasilitas atau sarana dan prasana yang memadai agar dapat mencapai tujuan suatu kebijakan. Sumber daya finansial dari pemerintah desa juga masih kurang karena terbatasnya anggaran dana untuk membangun TPST.

Hasil Dan Pembahasan

Gambar 4



Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau kemauan yang dimiliki para pelaksana kebijakan. Selain memiliki pengetahuan tentang tindakan apa yang dilakukan, pelaksana kebijakan diharuskan memiliki sikap dan kemampuan. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa dinas pekerjaan umum membantu pemerintah Desa Boro agar menormalisasikan sungai dengan membersihkan sungai, mengangkut sampah-sampah dari sungai agar sungai lebih bersih dan lingkungan menjadi sehat. Sikap para pelaksana kebijakan sudah baik dan para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam pengelolaan sampah telah berjalan sesuai. Para pegawai telah memiliki kemauan dan kesadaran dalam melakukan tugasnya, serta bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Hanya saja dari masyarakat yang kurang kesadaran diri dan kurang pemahaman mengenai persoalan sampah dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk membayar iuran untuk sampah.

Hasil Dan Pembahasan

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu organisasi yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus bisa mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi dengan baik. Jika struktur birokrasi pada implementasi tidak kondusif, yang terjadi adalah sumber daya tidak efektif juga tidak memiliki motivasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

Pada pengolahan sampah belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum ada SOP yang jelas karena Desa Boro belum memiliki TPST. Maka pengelolaan sampah di Desa Boro dilakukan dengan cara pengangkutan sampah oleh petugas pengangkut sampah, setelah sampah diambil dari rumah warga kemudian para petugas sampah melakukan pemilahan sesuai dengan jenis-jenisnya, setelah melakukan pemilahan petugas pengangkut sampah langsung membawa sampahnya ke TPA untuk pengolahan sampah lebih lanjut di TPA agar dapat dilakukan pemrosesan akhir.

Kesimpulan

Tujuan dari komunikasi yang efektif agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami informasi yang disampaikan agar terjalin komunikasi yang baik dari semua pihak yang dilibatkan dalam suatu implementasi kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa Boro melalui sosialisasi telah berjalan dengan lancar. Namun sosialisasi tersebut masih kurang maksimal karena tidak konsisten dalam pelaksanaannya, sebab sosialisasi tidak dilaksanakan secara rutin. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam implementasi pengelolaan sampah di Desa Boro, dilihat dari tenaga ahli yang menangani sampah memiliki jumlah yang kurang. Sumber daya fasilitas pun masih kurang memadai untuk mengangkut sampah. Sumber daya finansial dari pemerintah desa juga masih kurang karena terbatasnya anggaran dana untuk membangun TPST.

Sikap para pegawai ketika melaksanakan tugas masing-masing dalam pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan aturan, para pegawai telah memiliki kemauan dan kesadaran dalam melakukan tugasnya, serta bertanggung jawab akan tugastugasnya. Hanya saja dari masyarakat yang kurang kesadaran diri dan kurang pemahaman mengenai persoalan sampah dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk membayar iuran untuk sampah. Standar operasional prosedur dilapangan masih belum tersedia maka memakai standar operasional prosedur yang tercantum pada peraturan dari pemerintah daerah. SOP telah dipahami oleh para petugas pelaksana pengangkut sampah dan SOP telah dijalankan oleh petugas pengangkut sampah. Tetapi pada pengerjaannya, belum dapat berjalan dengan maksimal karena Desa Boro belum memiliki TPST.

Referensi

- [1] S. Nurjanah and F. Siti, "PENERAPAN PERDA NO 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA," *Res. Lembaran Publ. Ilm.*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [2] B. D. Hastuti, F. Anwar, and T. Darmi, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN," *J. Ilmu Adm. dan Pemerintah. Indones.*, vol. 2, no. 2, 2021.
- [3] Joleha, E. Yenie, Bochari, I. Suprayogi, and Feranita, "Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Komposter Sebagai Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Kompos," *J. Community Engagem. Res. Sustain.*, vol. 2, no. 3, pp. 152–161, 2022.
- [4] U.-U. R. INDONESIA, *UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*, no. 1. 2008, pp. 1–37.
- [5] Hasaruddin, "IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TRANSLIK PASIR PANJANG," *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 2, no. 4, pp. 1023–1038, 2022.
- [6] S. Dzuliazahraa, E. M. Ramdanib, H. T. Gedeonac, and N. Nurliawatid, "Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung," 2022.
- [7] L. Primaturrisma and M. . Ir. Dr. Yeni Dhokhikah S.T., "GERILYA (GERAKAN INOVATIF PENGELOLAAN LIMBAH DAN PUSTAKA): PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI KEGIATAN VERMIKOMPOS DAN ECOBRICK GUNA MENUMBUHKAN PERAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EDUKASI DAN BIDANG LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS 2030," *J. Prof. J. Lingkung. BERKELANJUTAN J. Teor. dan Terap. Bid. Tek. Lingkung.*, pp. 30–38, 2020.
- [8] M. D. Marasabessy and I. Rumodar, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)," *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, pp. 16–24, 2022.
- [9] B. SIDOARJO and P. D. K. SIDOARJO, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN*, vol. 1965. 2012, pp. 1–28.
- [10] D. A. Kurniawan and A. Z. Santoso, "PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH SEPATAN KABUPATEN TANGERANG," vol. 1, no. 1, 2020.

Referensi

- [11] M. I. Sahupala, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)," *J. Ilm. Indones.*, vol. 5, no. 4, 2020.
- [12] I. Probosari, "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN KROBOKAN KOTA SEMARANG," 2020.
- [13] M. F. S. Novaldi, A. Budiati, and Arenawati, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang," *J. DESENTRALISASI DAN Kebijak. PUBLIK*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [14] B. S. C. Dalinda, M. T. Lopian, and I. Sumampow, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado," *J. Gov.*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [15] Y. P. Dalimunthe, "Jurnal Ilmiah Kesehatan Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III," *J. Ilm. Kesehat.*, vol. 1, no. 2, pp. 59–64, 2022.
- [16] I. M. Harjanti and P. Anggraini, "Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) jatibarang, kota semarang," *J. Planol.*, vol. 17, no. 2, pp. 185–197, 2020.
- [17] S. Yunengsih and Syahrilfuddin, "THE ANALYSIS OF GIVING REWARDS BY THE TEACHER IN LEARNING MATHEMATICS GRADE 5 STUDENTS OF SD NEGERI 184 PEKANBARU," *J. PAJAR (Pendidik. dan Pengajaran)*, vol. 4, no. 4, pp. 715–723, 2020.
- [18] L. Rodhiyatussolichah, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo," pp. 1–9, 2023.
- [19] F. A. Zahro, "IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUTUH KECAMATAN MOJOSANGO KABUPATEN BOYOLALI," 2022.
- [20] S. D. Ambarwati and L. Mursyidah, "Policy Implementation of Exclusive Breastfeeding (ASI) Case Study in Bligo Village Candi District Sidoarjo Regency Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Studi Kasus Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," pp. 1–10, 2012.
- [21] M. S. Dr. Syahrudin, S.E., *Implementasi kebijakan publik*. 2018.
- [22] C. A. Sidik, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPRKPLH) KABUPATEN CIAMIS (Studi Analisis Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)," pp. 3984–3994, 2022.

